

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Dalam Hubungan internasional kontemporer saat ini sebuah negara tidak lagi bisa dilihat dan ditentukan dari kekuatan militer maupun ekonominya. Akan tetapi bisa juga ditentukan oleh nilai atau citra dari suatu negara itu sendiri. Banyak faktor-faktor yang mendorong terjadinya dinamika tersebut diantaranya semakin luas cakupan dan perkembangan ilmu hubungan internasional sehingga mengharuskan para aktor pelaku internasional untuk menjalin hubungan sesama aktor internasional lainnya. Dalam perkembangannya, dengan melihat fenomena-fenomena yang semakin tidak bisa di pisahkan dari berbagai aspeknya, maka metodologi hubungan internasional mengarah ke interdisipliner, makna bahwa berbagai aspek internasional bukan lagi digabung, tetapi ada satu paduan (Darmayadi dkk, 2015: 13).

Pada perkembangannya di dunia internasional saat ini, hubungan antar negara menjadi sangat penting terutama setelah perang dunia kedua usai. Banyak negara yang membangun kembali tatanan baru untuk mengembalikan keadaan negaranya. Hubungan antar negara sangat penting karna hakekatnya sebuah negara tidak akan mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Sehingga hal yang wajar bagi suatu negara menjalin kerjasama antar negara baik dengan negara tetangga, negara dalam satu kawasan maupun negara yang ada di kawasan lain. Hal ini terjadi karena ada faktor ketergantungan antar aktor-aktor internasional yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional atau tujuan masing-masing aktor pelaku hubungan

internasional. Dari ketergantungan tersebut menyebabkan adanya kompleksitas dalam hubungan internasional yang terdiri dari aktor yang saling berinteraksi. Sesuatu hubungan internasional bisa terjadi karena adanya interaksi melewati lintas batas negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Dalam praktiknya bahkan negara-negara bukan lagi bekerjasama dengan 1 atau 2 negara melainkan lebih dari 2 negara sekaligus.

Melihat cakupan hubungan internasional yang sangat luas terutama dengan dinamika yang dari masa kemasa terus mengalami perkembangan, menuntun studi Hubungan Internasional ini mengalami banyak pembaharuan dari segala aspek. Terlihat jelas pasca perang dingin usai, fokus hubungan internasional dihadapkan langsung pada tatanan dunia yang baru. Ketika dimana tidak ada lagi studi hubungan internasional yang hanya berfokus kepada ketegangan global. Bila dilihat dari sejarahnya pada masyarakat dahulu, studi hubungan internasional tidak begitu populer di kalangan terutama saat dimana kuasa gereja masih sangat kuat pada masa itu. Kemudian kajian studi hubungan internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di benua Eropa pada masa pasca perjanjian Westphalia 1648 yang memutuskan untuk memisahkan gereja (agama) dari politik dan serta memberika hak kepada negara untuk menjalankan kedaulatannya. Barulah setelah perjanjian Westphalia terbentuk, kemudian para aktor hubungan internasional mulai memahami arti dari hubungan internasional tersebut kemudian mulai menerima dikaji dan mengembangkannya khususnya di Eropa.

Dari waktu ke waktu barulah hubungan internasional mulai mengalami kemajuan yang lebih pesat ilmu yang perkembangannya menjadi ilmu yang benar-

benar mandiri *a real distinct discipline* pada tahun 1919 seorang dan juga konseptor Liga Bangsa-Bangsa, Sir Alfred Zimmern, diangkat menjadi guru besar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Wales di Aberystwith. Sejak saat itulah ilmu hubungan internasional mulai berkembang tidak hanya di Eropa, Amerika serika, tetapi ke seluruh belahan bumi. Tatanan baru pun mulai terasa menandakan akan dimulainya era baru yang dikenal sebagai era kontemporer dengan peran globalisasi sebagai penggerak dari era itu sendiri. Dan sebagai karakteristik dari studi hubungan internasional tidak lain yaitu diplomasi yang dihadapkan pada sejumlah dinamika baru. Diplomasi berkaitan erat dengan aktivitas politik yang biasa dilakukan oleh para aktor hubungan internasional untuk mencapai tujuan-tujuan serta mempertahankan kepentingan dengan cara negosiasi dengan negara atau kelompok organisasi-organisasi internasional. Maka dari itu mengapa diplomasi berkaitan erat dengan studi hubungan internasional, karena dalam pelaksanaannya selalu adanya interaksi antara negara-negara termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (Jakson & Sorensen, 2013: 4).

Dari berbagai bentuk dari sebuah diplomasi yang dimana melibatkan lebih dari 1 ataupun 2 negara sekaligus tidak serta merta menimbulkan ketergantungan antar actor-actor pelaku yang kemudia disebut interdependensi. Kemudian akan erat kaitannya ketika membicarakan interdependensi dengan kepentingan nasional, terbentuknya interdependensi suatu negara karena adanya kepentingan nasional dari suatu negara itu sendiri. Kepentingan nasional disini dalam hubungan internasional dimana suatu negara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk

dapat menguntungkan atau memenuhi kebutuhannya, kerjasama yang dimaksud bisa dalam bentuk kerjasama bilateral ataupun multilateral. Terjalannya hubungan bilateral maupun multilateral yang melibatkan antar negara pada dasarnya. Tidak serta merta menutup kemungkinan terjadinya pertentangan atau konflik antar actor satu dengan yang lainnya. Konflik sendiri memiliki puncak utama yaitu perang, namun berkat adanya studi hubungan internasional akan terjadinya perang pada masa ini dapat diminimalisir dengan kebijakan-kebijakan yang dapat dikeluarkan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, dll.

Seperti yang telah di paparkan di atas, pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara yang menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal tersebut. Keputusan itu biasanya digunakan sebagai alternatif sebelum mencapai puncak dari konflik itu sendiri. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi terjadinya putusan diplomatik antara lain, bila terjadi perang antara kedua negara ataupun kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan kebijakan negara lain. Hal tersebut yang sekarang terjadi di kawasan Timur Tengah antara Qatar dan Arab Saudi.

Melihat dari sejarahnya, kedua negara Qatar-Arab Saudi tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat secara melihat keduanya merupakan negara yang saling bertetangga. Salah satu yang menjadi bukti kuat akan terjalannya hubungan yang harmonis antara kedua negara tersebut adalah keikutsertaannya dalam *gulf cooperation council*. GCC adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1981 yang beranggotakan dari negara-negara Teluk. Namun ketika diplomasi teluk yang hampir mendekati diplomasi sempurna mulai mengalami gejolak (Coates, 2014: 4).

Pergejolakan tersebut berawal dari kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar yang bersebrangan dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya membuat permasalahan semakin runyam. Berlanjut atas kebijakan Qatar yang diduga mendukung garis keras seperti Ikhwanuk Muslimin, Isis, kelompok Hamas, mengakui pengaruh Iran, serta aliran-aliran radikal lainnya yang diduga Qatar melakukan dukuan finansial berupa aliran dana terhadap pembelian senjata. Selain itu Qatar juga dianggap terlalu mencampuri urusan internal negara-negara di Timur Tengah.

Semakin memanasnya dari fenomena tersebut dimana ketika pidato Emir Qatar yaitu Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani menyatakan bahwasannya Iran memiliki kekuatan regional dan Islam yang tidak bisa di abaikan dan tidak mungkin membuat perlawanan dengan Iran. Di sini Qatar melupakan bahwa Arab Saudi selaku hegemon di kawasan Timur Tengah merupakan musuh alami dari Iran karena keduanya saling bertentangan dan pengaruh yang besar di kawasan itu sendiri. Pada Tahun 2017 barulah pemutusan diplomatik dilakukan oleh negara-negara Teluk. Ketika Arab Saudi bertindak dan memiliki pengaruh besar di Timur Tengah sangat memungkinkan berefek kepada kawasan itu sendiri, hal tersebut bisa terbukti dengan negara sekutu yang mengikuti langkah Arab Saudi yaitu Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Libia, Yaman dan Maladewa.

Tidak mengherankan ketika membahas konflik terkait yang terjadi di Timur Tengah hingga konflik bahkan perang sudah melekat pada kawasan ini. Hal tersebut bisa terjadi karena kawasan ini memiliki keunggulan dari berbagai aspek, mulai dari geografis, historis maupun kekayaan alam yang ada di wilayah ini menjadikan pusat

perhatian bagi banyak pihak untuk dapat menguasainya. Terdapat hal menarik dalam membahas fenomena konflik yang terjadi di Timur Tengah baru-baru ini pada dinamika berlangsungnya konflik selalu melibatkan Arab Saudi ke dalam perselisihan yang terjadi di Timur Tengah. Seperti perselisihan antara Arab Saudi dengan Iran, kemudian perselisihan antara Arab Saudi dengan Turki, intervensi terhadap politik domestic di Yaman yang dilakukan Arab Saudi mendukung secara penuh pemerintahan Yaman. Dan yang paling menonjol belakangan ini yaitu konflik antara Arab Saudi dan Qatar. Melihat fenomena yang terjadi di Timur Tengah sangat mengganjal seakan sudah tersusun, padahal jika melihat dari historisnya Arab Saudi terkenal dengan pintar menempatkan posisi untuk tidak ikut capur urusan yang di luar wilayahnya. Seperti konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel contohnya Arab Saudi memilih untuk tidak terlalu ikut campur seperti negara-negara lain yang bahkan mengutuk perlakuan Israel terhadap Palestina.

Tepatnya perubahan kebijakan Arab Saudi saat ini terlihat jelas pasca kejadian Arab Spring, sangat terlihat dimana Arab Saudi terdapat Intervensinya di semua konflik yang terjadi di Timur Tengah, terlebih seakang-akan Arab Saudi ingin melihatkan hegemoninya di kawasan. Setidaknya terdapat 2 isu sensitive yang tidak dapat dilupakan dan menjadi dasar bagi Arab Saudi yang pertama tentunya dilarang keras terpengaruh oleh paham Iran dan yang kedua yaitu mendukung setiap pihak terhadap kerajaan Arab Saudi. Maka tidak mengherankan ketika Arab Saudi mengambil tindakan tegas terhadap Qatar karena seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa Arab Saudi sangat kontra terhadap pemahaman Iran.

Secara kronologis pemutusan hubungan diplomatik yang semakin memanas di Timur Tengah antara Qatar dengan Arab Saudi bermula dimana saat Qatar melakukan hubungan baik bahkan ada dugaan memberikan dukungan finansial merupakan dana terhadap pembelian senjata kepada para ekstrimis seperti Ikhwatul Muslimin, ISIS, Kelompok Hamas, dan aliran radikal lainnya. Selain itu Qatar sendiri dituduh terlalu mencampuri urusan internal negara-negara tetangga anggota GCC. Tepatnya pemutusan diplomatik ini semakin memanas lagi pada tanggal 24 Mei 2017, di sebuah acara militer oleh Emir Qatar sendiri yaitu Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani yang dalam pidato upacara militer tersebut disiarkan secara langsung oleh media Qatar yaitu News Agency (QNA). Dalam beberapa kutipan dalam berpidatonya Emir Qatar mengatakan bahwa negaranya memiliki hubungan yang baik dengan Iran, bahkan mengatakan bahwa Iran merupakan salah satu aktor politik dan regional Timur Tengah yang kekuatannya tidak bisa dikesampingkan. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Iran yang notabenenya merupakan musuh dari Arab Saudi, tidak lama dari berita itu tersebar Arab Saudi segera merespon dengan memblokir situs media Qatar di negerinya.

Untuk meredam suasana agar tidak semakin memanas dan agar tidak semakin meluasnya pemberitaan tersebut, pemerintah Qatar melakukan pembelaan. Dalam pembelaannya Qatar memberikan penjelasan mengenai pemberitaan tersebut bahwa berita tersebut telah diretas oleh pihak peretas. Tapi disamping itu pemerintahan Qatar telah melakukan berbagai upaya untuk tidak semakin memanasnya permasalahan yang akan ditimbulkan, disamping itu Arab Saudi sudah terlanjur menanggapi dengan tegas.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas akhirnya Arab Saudi bertindak lebih lanjut dengan memutuskan hubungan diplomatiknya secara resmi dengan Qatar pada 5 Juni 2017, yang diikuti langsung oleh aliansi Arab Saudi yaitu Uni Emirate Arab, Bahrain, Mesir, dan tidak lama dari itu negara-negara lain seperti Maladewa dan Libia juga mengikuti langkah yang dilakukan aliansi Arab Saudi untuk sama-sama memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar walaupun langkah pemutusan diplomatiknya tidak separah yang dilakukan oleh Arab Saudi.

Kemudian pada perkembanganya pemutusan diplomatik tersebut Arab Saudi menegaskan secara jelas hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Qatar demi meredam pemutusan tersebut. Ada 13 point tuntutan sekaligus syarat yang diajukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar bila ingin menyudahi perselisihan terkait krisis diplomatik. Berikut adalah daftar dari 13 tuntutan tersebut:

1. Qatar harus secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menutup kantor diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Iran. Hanya perdagangan yang mematuhi sanksi internasional yang akan diizinkan dengan syarat tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk Gulf Cooperation Council (GCC).
2. Segera menghentikan pembangunan pangkalan militer Turki yang saat ini sedang dibangun dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam wilayah Qatar.
3. Menghentikan semua dukungan dengan semua “organisasi teroris, sektarian dan ideologis,” khususnya Ikhanul Muslimin, ISIS, Al-Qaeda, Jabh Fath A;-

Sham (sebelum dikenal sebagai Front Al-Nusra) dan Hizbullah Libanon. Qatar harus menyatakan secara resmi bahwa kelompok-kelompok tersebut sebagai kelompok garis keras/teroris berdasarkan daftar kelompok yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirate Arab dan Mesir.

4. Menghentikan semua sarana pendanaan dan dukungan untuk tokoh, individu, kelompok atau organisasi yang telah ditunjuk sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara-negara lain.
5. Menyerahkan “tokoh teroris,” dan tokoh yang melarikan diri dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Qatar harus membekukan aset mereka, dan memberikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, gerakan dan keuangan mereka.
6. Qatar harus menutupi jaringan TV Al Jazeera dan stasiun afiliasinya.
7. Mengakhiri campur tangan negara tetangga, menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada warga negara melarikan diri dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain Qatar harus mencabut kewarganegaraan bagi warga negara melanggar undang-undang negara tersebut.
8. Qatar harus membayar ganti rugi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Qatar.
9. Qatar harus menyesuaikan diri dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi, serta masalah ekonomi, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Arab Saudi pada tahun 2014.

10. Qatar harus menghentikan semua kontak dengan tokoh opososi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain.
11. Qatar harus menghentikan semua saluran berita yang menghasut provokasi di kawasan Teluk, baik seara langsung dan tidak langsung, seperti Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Makemeleen dan Middle East Eye, dll.
12. Qatar harus menyetujua semua tuntutan dalam waktu 10 hari setelah diserahkan ke Qatar, atau blokade akan terus berlanjut.
13. Qatarmenyetujui audit bulanan oleh Dewa Kerjasama Teluk (GCC) untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan tersebut, dan per-kuartal selama tahun kedua. Selama 10 tahun berikutnya, Qatar akan dipantau setiap tahun untuk pelaksanaan komitmen bersama GCC. (Diakses dari <https://www.moslemtoday.com/arab-saudi-dan-koalisi-negara-teluk-terbitkan-13-daftar-tuntutan-sebagai-syarat-untuk-mengakhiri-krisis-qatar/> pada tanggal 10 Mei 2021).

Melihat dari 13 tuntutan diatas yang tidak memungkinkan dilakukan dengan serentak, bahkan menteri luar negeri Qatar mengatakan kepada awak media bahwa terdapat kemungkinan krisis Teluk merupakan konfigurasi yang sengaja dilakukan Arab Saudi untuk membendung Qatar yang belakangan ini kemajuannya sangat pesat dan agar membentuk pemikiran bahwa Arab Saudi masih menjadi hegemoni kawasan hingga saat ini. Pada kenyataannya dari tuntutan diatas untuk menyelesaikan krisis diplomatik tersebut hinggal pertengahan tahun 2021 ini Qatar belum juga bisa menyanggupinya. Tentu saja dampaknya bagi Qatar sendiri sangat

dirugikan mengingat dari blokade tersebut yang dimana perekonomian Qatar harus melakukan manuever agar bisa meminimalisir dampak dari blokade itu sendiri.

Manuever disini dilakukan oleh Qatar tentunya untuk meminimalisir dampak dari sanksi yang diberikan oleh negara-negara Teluk khususnya Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Disini Qatar telah membuka jalur perdagangan baru yang dimana sebelumnya dari sanksi tersebut jalur akses perdagangan darat, udara, maupun laut dengan negara-negara Teluk telah ditutup yang kemudian menuntut Qatar untuk menentukan jalur perdagangan barunya untuk mengatasi dari blokade tersebut. Pada perkembangannya Qatar telah membuka jalur perdagangan barunya yang dimana membentuk kerjasama dengan negara Turki, Iran, dan Oman.

Konstelasi geopolitik di kawasan Timur Tengah akhirnya telah berubah semenjak diberlakukannya sanksi diplomatik yang di lakukan Arab Saudi kepada Qatar. Perubahan tersebut khususnya di kawasan Teluk, dimana memaksa Qatar untuk memperkuat kemampuan domestiknya untuk mengganti impor yang hilang dari negara-negara pemblokiran. Pemerintahan Qatar juga telah mengganti supliernya dimana menemukan jalur perdagangan baru, Qatar telah membentuk aliansi erat dengan Turki yang memberikan akses diplomatik baru ke Qatar berupa kekuatan militer. Seiring berjalannya aliansi antara Qatar dan Turki kemudan Qatar juga memperkuat hubungannya dengan Iran yang menjadi sumber supplier bagi Qatar, dan kemudian kerjasama dengan Oman. (Diakses dari <https://foreignpolicy.com/2018/06/04/qatar-won-the-saudi-blockade/> pada tanggal 27 Juni 2021).

Adapun proses dalam menciptakan karya ilmiah ini dengan dukungan referensi untuk dijadikan standar dan landasan yang dikolaborasikan dengan pemikiran pribadi. Setidaknya ada 5 referensi skripsi yang relevan dan sangat membantu dalam terbentuknya karya ilmiah ini. Yang pertama ada penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Kebijakan Arab Saudi Terkait Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif Decision Making*” oleh Ahmad Turmudzi dari Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menganalisis pergejolakan yang terjadi di Timur Tengah khususnya hubungan bilateral antara Qatar dengan Arab Saudi. Beliau menjelaskan sejarah terperinci mengenai kebijakan Arab Saudi terkait Blokade yang dilakukannya terhadap Qatar, beserta faktor-faktor pendorong yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tersebut. Terdapat kemiripan atau kesamaan dalam karya ilmiah yang saya buat yaitu, dari sudut pandang kawasan negara di Timur Tengah. Namun pembedanya dengan karya ilmiah yang saya buat dari segi kawasan dimana saya menjadikan jangkauannya lebih luas yang tertuju kepada negara-negara kawasan Teluk.

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul “*Strategi Qatar Dalam Menghadapi Embargo Ekonomi Negara-Negara Teluk (Arab Saudi, Uni Emirate Arab dan Bahrain) Tahun 2017-2018*” oleh Yola Gustanti dari universitas Riau. Dalam penelitiannya beliau membahas mengenai manuver ekonomi yang dilakukan Qatar dibawah Emir *Syeikh Hamad Bin Khalifa Al Thani* beserta dengan strategi-strategi maupun tindakan yang dilakukan Qatar demi meminimalisir dampak dari Blokade yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Teluk (Arab Saudi, Uni Emirate Arab

dan Bahrain). Adapun kemiripan dengan hasil penelitian yang saya teliti yaitu upaya yang dilakukan Qatar demi meminimalisir dampak dari Blokade itu sendiri.

Ketiga, ada hasil penelitian skripsi terdahulu yang berjudul “*Krisis Hubungan Bilateral Qatar-Arab Saudi Pada 2017*” oleh Nur Muh. Wildan FU. Universitas Jember. Hasil dari karya ilmiah beliau menjabarkan secara detail faktor keputusan Arab Saudi yang memberlakukan sanksi diplomatik kepada Qatar pada tahun 2017 yang juga diikuti oleh sekutunya di kawasan Timur Tengah yang menjadikan Arab Saudi dan sekutu dengan Qatar mengalami perpecahan dan mengakibatkan perubahan konstelasi geopolitik di kawasan tersebut. Serta menganalisa motif dari Arab Saudi yang memberlakukan sanksi diplomatik kepada Qatar setelah pidato Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang menyatakan hubungan kepada Iran. Beberapa persamaan dan kemiripan dengan karya ilmiah yang saya buat dengan kawasan Timur Tengah yang menjadi cakupan dari penelitian, yang membedakan yaitu mengenai pokok pembahasannya dimana peneliti disini lebih mengedepankan upaya Qatar dalam menghadapi krisis tersebut.

Selanjutnya yang ke-4, ada hasil penelitian yang berjudul “*Pemutusan Hubungan Diplomatik Qatar Oleh Arab Saudi Pada Tahun 2017 Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Internasional*” oleh Umu Quro’atul Alvin Masfiya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitiannya beliau membahas secara rinci mengenai sejarah pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi dan aktivitas ekonomi politik Qatar di Timur Tengah yang kemudian dianalisis menggunakan teori hegemoni.

Dan yang terakhir skripsi yang berjudul “*Integrasi Kawasan Teluk Pasca Krisis Diplomasi Arab Saudi Dengan Qatar Tahun 2017-2020*” oleh Nathanael Febrian dari Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini lebih menjabarkan kepada pengaruh dan dampak dari konflik Qatar dan Arab Saudi terhadap proses integrasi di kawasan Teluk pasca krisis diplomatik dan proses integrasi kawasan Teluk sebelum pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi. Yang dimana proses integrasi kawasan di kawasan Teluk hampir melangkah ke tahap integrasi sempurna.

Dari kelima judul diatas sudah jelas bahwa penelitian yang saya buat kajian serta pembahasan objek yang sama namun dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Yang dimana objek tersebut sama-sama membahas mengenai fenomena konflik antara Qatar dengan Arab Saudi. Sedangkan peneliti disini lebih kepada menitik beratkan pembahasan mengenai “Upaya Qatar Dalam Menghadapi Krisis Diplomatik Dengan Arab Saudi Tahun 2017-2021”

Adapun alasan terhadap judul yang peneliti angkat, diantaranya karena terdapat beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Yaitu Hukum Internasional, Dinamika Politik Internasional, Hubungan Internasional di Timur Tengah.

1. Mata kuliah Hukum Internasional, penelitik mendapatkan pandangan baru yang salah satu kajiannya membahas tentang hubungan diplomatik dan konsuler.
2. Mata kuliah dinamika politik Internasional, melalui mata kuliah ini peneliti mendapatkan pengetahuan yang dapat menggambarkan dari setiap

dinamika yang terjadi di dunia internasional. Mata kuliah ini membantu peneliti dalam menangkap setiap fenomena yang terjadi di lingkungan internasional.

3. Mata kuliah studi Timur Tengah, dalam pembelajarannya yang mengkaji mengenai penataan konflik antar negara di Timur Tengah beserta sejarah dari Timur Tengah.

Dari hal-hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan sebagai landasan skripsi berdasarkan relevansi “core subject” di prodi Hubungan Internasional UNIKOM. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan bahasan terhadap Strategi Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dibahas diawal, maka penulis membagi rumusan permasalahan dalam 2 kategori:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Rumusan masalah mayor dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi Tahun 2017-2021?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Qatar dalam meminimalisir dampak dari pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Teluk?
2. Apa kepentingan Arab Saudi dalam 13 tuntutan yang ditujukan kepada Qatar?
3. Sejauh mana efektifitas upaya yang dilakukan Qatar dalam mengdapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi Tahun 2017-2021?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini akan peneliti batasi yang dimana hanya pada kawasan Teluk, dan peneliti mengambil periode tahun 2017-2021 untuk memudahkan serta menyederhanakan fenomena kasus bagi peneliti dalam memecahkan permasalahan yang terjadi dan juga agar pembahasan tidak melebar serta keluar dari topik permasalahan. Terlebih peneliti mengambil periode tersebut, mengingat bahwasannya dalam periode tersebut adalah titik puncak dalam dinamika yang terjadi antara Qatar dan Arab Saudi sehingga peneliti dalam menyederhadakan penelitian ini mengambil periode tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Melihat pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka secara garis besar penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi tahun 2017-2021.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya ilmiah ini antara lain untuk:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Qatar dalam menghadapi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya.
2. Untuk mengetahui ada kepentingan apa Arab Saudi dari 13 tuntutan yang ditujukan kepada Qatar.
3. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas upaya yang dilakukan Qatar dalam menghadapi krisis diplomatik dengan Arab Saudi.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang akan di peroleh, disini peneliti berharap akan mampu memberikan manfaat dalam dua bidang yang meliputi manfaat dari segi akademis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian disini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap pengembang dalam bidang studi hubungan internasional. Serta penelitian ini bisa dijadikan sumber refrensi maupun acuan serta sumber pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin memperdalam mengenai kajian di kawasan Timur Tengah khususnya mengenai pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi beserta sekutunya terhadap Qatar pada tahun 2017-2021.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis dari karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap peneliti maupun pembaca terutama berharap dapat menambah wawasan mengenai hubungan internasional terkait dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dan karya ilmiah ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai dinamika politik internasional. Bagi penulis sendiri berharap dapat melatih daya pikir, analisa fenomena, dan wawasan sebagai salah satu penstudi hubungan internasional.

